=PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega)

Riska Tresnaasih
21110104

Program Studi Akuntasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

The government is always working to increase the tax ratio gradually and with due to the economic conditions of Indonesia . Distress warrant held in the Tax Office Pratama Bandung Tegalega Year 2014-2015 major influence tax revenues. The amount of tax arrears makes the disbursement of tax arrears to be one way to optimize tax revenue in the tax office .

The method used in this research is descriptive method and Verivikatif with quantitative approach . Statistical test used is multiple linear analysis .

Hypothesis testing results show that (1) Tax Collection Letter Forced significant effect on Tax Revenues period January 2014 - December 2015 (2) Disbursement significant effect on the Tax Arrears of Revenue period January 2014 - December 2015 .

Keywords : Distress warrant, Disbursement of tax arrears , Tax Revenue

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang selalu berupaya meningkatkan *tax ratio* secara bertahap dan dengan memperhatikan kondisi ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia, peningkatan secara bertahap *tax ratio* dilakukan melalui penyempurnaan terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan, sehingga basis pajak dapat semakin luas, dan potensi pajak yang ada dapat di pungut secara optimal, karena sektor perpajakan ini merupakan pendapatan signifikan dalam menyumbang anggaran pemerintah dalam penyelengaraan negara, pembangunan nasional suatu negara dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia, dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah, salah satu sumber penerimaan dalam negeri adalah dari sektor pajak, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik (Soemitro,2012).

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan, pembangunan yang sedang dilakukan oleh Indonesia adalah pembangunan nasional, pengertian Pembangunan Nasional adalah merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan
perkembangan global (Tap. MPR No. IV/MPR/1999). Tujuan pembangunan nasional "Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera dalam kurun waktu lima tahun ke depan" (GBHN tahun 1999-2004). Pemerintah memerlukan dana, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pembiayaan pelaksanaan fungsinya, baik fungsi pokok ekonominya maupun fungsi secara keseluruhan. Modal berupa dana tersebut selain dari potensi alam yang dimiliki suatu negara, juga berasal dari laba suatu negara, royalti pemerintah, restribusi, kontribusi, bea dan cukai, sanksi dan denda serta berasal dari pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:10).

Suatu pemenuhan kewajiban perpajakan, yang harus dilakukan wajib pajak melalui pelaporan SPT, laporan penyelesaian tunggakan pajak dan perkembangan pembayaran atau

penyetoran pajak terutang disebut kepatuhan (Chaizi Nasucha, 2004:38). Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Direktorat Jendral (Ditjen) pajak masih lemah dalam penagihan piutang pajak, upaya Ditjen Pajak menagih utang yang tertunggak dari sejumlah wajib pajak terutama perusahaan belum efektif, BPK menemukan sejumlah kelemahan dari aspek strategis, sistem administrasi, sumber daya, hingga aspek pengawasan dalam penagihan piutang pajak (Hadi Purnomo, 2010). Penagihan pajak diharapkan menjadi ujung tombak KPP dalam menghimpun penerimaan pajak, namun dalaM kenyataannya dalam pelaksanaan penagihan pajak dari diterbitkannya surat teguran sampai dilakukan penyitaan masih ditemukan wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajkanya tersebut (Darmin Nasution, 2009). Menurut petugas salah satu KPP Pratama Bandung Karees pada seksi penagihan mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan masih belum optimal, hal tersebut terlihat dalam proses penagihan pajak sering menumukan wajib pajak yang mempunyai tunggakan tetapip tidak mau membayar utang pajaknya sehingga dengan tidak dilunasinya tunggakan tersebut mengakibatkan penerimaan pajak tidak terealisasi atau tidak sesuai target, masalah mobilitas wajib pajak atau penanggung pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, yang tidak melaporkan alamat barunya juga mengakibatkan aparat penagihan mengalami kesulitan menagih hutang pajak tersebut (Rukhiyadin, 2012).

Jumlah surat paksa dari tahun 2014 hingga tahun 2015 yang telah dikeluarkan dan nilai nominal masing-masing surat paksa jumlahnya selalu berbeda, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam hal membayar pajak sehingga harus memaksa Petugas Pajak untuk melakukan penagihan, setelah sebelumnya di beri surat teguran namun masih ada saja Wajib Pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya, peningkatan penagihan dengan surat paksa menandakan penagihan pajak selama ini belum optimal, karena penerbitan surat paksa menandakan proses penagihan sebelumnya dihiraukan oleh Wajib Pajak, yang seharusnya Wajib Pajak membayar pajak sebelum jatuh tempo hingga diterbitkannya surat teguran mereka masih tidak membayar hutang pajak (Bhirawa Dwi Saputra F, 2016).

Penagihan pajak dengan surat paksa dirasakan masih terhalang dengan berbagai hambatan yang pada akhirnya menyebabkan sulitnya mendapatkan pelunasan hutang pajak oleh wajib pajak adapun kendala eksternal dapat berupa perlawanan pasif maupun aktif dalam kerjasama dengan pihak terkait, pengetahuan wajib pajak, likuiditas dan wajib pajak yang sudah tidak berada dialamat terdaftar, sedangkan hambatan internal dapat berupa hambatan yang datang dari Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP), jurusita pajak, maupun petugas pajak lainnya seperti administrasi penagihan pajak, koordinasi, pengawasan, kualitas dan kuantitas jurusita pajak maupun dari sarana yang disediakan, seperti dalam beberapa kasus ada petugas juru sita kami yang diancam golok saat bertugas menyampaikan surat paksa kepada salah satu wajib pajak, sehingga penagihan yang kurang efektif dengan penyampaian surat paksa tersebut (Rusjadi, 2007:34).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Direktorat Jendral (Ditjen) pajak masih lemah dalam penagihan piutang pajak, upaya Ditjen Pajak menagih utang yang tertunggak dari sejumlah wajib pajak terutama perusahaan belum efektif
2. Peningkatan penagihan dengan surat paksa menandakan penagihan pajak selama ini belum optimal.
3. Dalam proses penagihan pajak sering dietemukan wajib pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau membayar utang pajaknya.
4. Tidak dilunasinya tunggakan tersebut mengakibatkan penerimaan pajak tidak terealisasi atau tidak sesuai target
5. Dalam kenyataannya dalam pelaksanaan penagihan pajak dari diterbitkannya surat teguran sampai dilakukan penyitaan masih ditemukan wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajkanya tersebut

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Tegalega.
2. Seberapa besar pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Tegalega.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan penelitian masalah yang telah dirumuskan di atas diketahui bahwa penelitian ini dilakukan dengan maksud mendapatkan data yang akan akurat dan relevan berkaitan dengan masalah yang sudah diuraikan diatas.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Tegalega.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Tegalega.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis
   Kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu akuntansi perpajakan khususnya pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Bagi Intansi
   Hasil penelitian dapat memecahkan masalah yang ada pada KPP mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, pencairan tunggakan pajak, dan penerimaan pajak.
3. Bagi Peneliti Lain
   Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu mengenai penagihan pajak dengan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak dan penerimaan pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai pembuktian empiris dari konsep-konsep yang telah dikaji yaitu hasil-hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang telah ada mengenai hubungan penagihan pajak dengan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak dan penerimaan pajak

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penagihan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2006:174) mengatakan bahwa :

"Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak".

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Buku Pedoman Penagihan Pajak (2009:1) yang dimaksud dengan penagihan pajak yaitu :

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

2.1.1.2 Pengertian Surat Paksa

Pengertian surat paksa menurut Mardiasmo (2009:121) adalah sebagai berikut :

"Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:70) menyebutkan bahwa :

"Surat Paksa dalam hukum disebut *parate ecsecutie* yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa proses pengadilan negeri. Surat paksa karena mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum pasti, dimana fiskus (pejabat pemungut pajak) dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak *parate ecsecutie*".

2.1.1.3 Indikator Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Diaz Priantara (2012:115) adapun indikator untuk penagihan pajak dengan surat paksa adalah jumlah nominal surat paksa yang dikeluarkan. Maka penulis akan meneliti jumlah nominal surat paksa yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.

2.1.2 Pencairan Tunggakan Pajak

2.1.2.1 Pengertian *Pencairan Tunggakan Pajak*

Menurut Yustinus Prastowo (2009:164) pencairan tunggakan pajak adalah:

"Pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak".

Pengertian pencairan tunggakan pajak yang dikemukakan oleh Waluyo (2003:64) adalah sebagai berikut:

"Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi".

2.1.2.2 Indikator Pelunasan Tunggakan Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012:135), indikator pelunasan tunggakan pajak yaitu Jumlah tunggakan pajak. Jumlah utang pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Maka peneliti akan meneliti jumlah pencairan atau pelunasan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah sebagai berikut: "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan indikator di atas maka penulis akan menghitung realisasi penerimaan pajak yang di terima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Peneriman Pajak

Menurut Waluyo (2000:238)

"Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum dapat diimbangi dengan

kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat, terhadap tunggakan pajak maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa".

2.2.2 Pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:35) menyatakan:

"Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelunasan tunggakan pajak agar penerimaan pajak bisa menjadi optimal".

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan dan paradigma penelitian, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hı : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H_2 : Pencairan Tunggakan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

III METODE PENELITIAN

Pengertian metodologi penelitian menurut Sugiyono (2012:2) adalah sebagai berikut :

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis".

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif dan verifikatif yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk di ambil kesimpulannya.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Umi Narimawati, dkk (2010:31). Operasional variabel didefinisikan sebagai berikut:

"Operasionalisasi varibel adalah proses penguraian variabel peneltian keadaan sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apablia belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor".

Hipotesis yang diajukan untuk diuji melalui variabel-variabel yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Variabel Bebas/*Independent Variable* (X_1 dan X_2)

   Menurut Sugiyono (2012:39), variabel bebas adalah:

   "Variabel yag mempengaruhi atau yang menjadi sebab peruubahannya atau timbulnya variabel *dependent* (terikat)".

   Variabel bebas dalam penelitain ini adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X_1) dan Pencairan Tunggakan Pajak (X_2).

2. Variabel Tidak Bebas/*Dependent Variable* (Y)

   Menurut Sugiyono (2012:39), varibel tidak bebas adalah:

   "Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karna adanya variabel bebas".

   Adapun variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak. Penerimaan Pajak merupakan hasil yang didapatkan dari penagihan dan pencairan tunggakan pajak.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2012:137) sumber data dapat dibagi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan definisi sebagai berikut:

"Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Misalnya dari pihak lain atau lewat dokumen".

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat Serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Warsito (1992: 49) adala sebagai berikut :

"Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian".

Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi yang penulis gunakan sebagai objek penelitian adalah Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.

3.4.2 Sampel

Definisi sampel menurut Arikunto (2002:109), adalah :

"Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti."

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampel Jenuh.

Menurut Sugiyono (2001:61) pengertian dari sampel jenuh adalah :

"Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang".

Dalam penelitian ini data sampel yang digunakan adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan infomasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Pajak Pratama Bandung Tegalega yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 216

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah di mulai bulan Februari 2016 sampai Agustus 2016.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Untuk menunjang hasil penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan dengan dua cara, yaitu :

1. Studi lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dari Kantor Pajak Pratama Tegalega, ada beberapa langkah, antara lain:

1. Pengamatan (*Observation*)
2. Wawancara (*Interview*)

2. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengumpulkan teori-teori yang mendasari penelitian, yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan analisis terhadap data dan informasi yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak. Dalam penelitian ini penulis mempelajari buku-buku, artikel, dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Pengujian validitas digunakan untuk mengukur alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data.

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Rancangan Analisis

3.6.1.1 Pengujian Asumsi Klasik

Teknik pengujian data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, dimana uji asumsi klasik ini terdiri dari :

1. Uji Normalitas

Menurut Singgih Santoso (2002:393)

"Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

- Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model adalah normal.
- Jika probabilitas < 0,05 maka model tidak berdistribusi secara normal Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode grafik normal *Probability Plots* dalam program SPSS.
- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas".

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Singgih Santoso (2012:234) menjelaskan bahwa :

"Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasidiantara variabel *independen.*Jika terbukti ada multikolinearitas, sebaiknya salah satu variabel independen dikeluarkan dari model, lalu pembuatan regresi di ulang kembali".

3. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan *uji-rank Spearman* Gujarati (2003: 406) yaitu:

"Dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error). Jika nilai koefisien korelasi antara variabel bebas dengan nilai absolut dari residual(error) signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen)".

3.6.1.2 Analisis Korelasi (*Product Moment*)

1. Analisis Regressi Berganda

Analisis regresi adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel Y dan variabel X_1 dan X_2 sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaan untuk variabel Y. Analisis regresi sederhana digunakan peneliti dengan maksud untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa (X_1), pelunasan tunggakan pajak (X_2) terhadap penerimaan pajak (Y).

Persamaan regresi linier berganda variabel penagihan pajak dengan surat paksa, penacairan tunggakan pajak dan penerimaan pajak diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y	= Penerimaan Pajak
X_1	= Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
X_2	= Pencairan Tunggakan Pajak
b_0	= Konstanta
b_1,b_2	= Koefisien Regresi

2. Analisis Korelasi Parsial

Analisis korelasi parsial berfungsi untuk mencari kuatnya hubungan antara masing-masing variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana keeratan hubungan antara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pencairan Tunggakan Pajak secara parsial dengan Penerimaan Pajak.

3. Koefisien Determinasi (KD)

Untuk mengetahui besarnya kontribusi atau peran variabel X dan variabel Y, dapat dihitung dengan rumus koefisien determinasi.

Rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$kd=r^2 \times 100\%$

(Sugiyono, 2006)

Dimana : kd = Koefisien Determinasi
r = Koefisien Korelasi

3.7 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan pada hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, maka penulis menetapkan hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah hipotesis asosiatif.

1. Hipotesis Statistik

Berdasarkan pada alat statistik yang digunakan dan hipotesis penelitian di atas maka penulis menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya yaitu hipotesis nol (H_0) yang diformulasikan untuk ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) yaitu hipotesis penulis yang diformulasikan untuk diterima, dengan perumusan sebagai berikut:

Ho: $\beta = 0$ Penagihan pajak dengan surat paksa (*independent* (X_1)), Pelunasan tunggakan pajak (*independent* (X_2)), tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak (*dependent* (Y)) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega

Ha: $\beta \neq 0$ Penagihan pajak dengan surat paksa (*independent* (X_1)), Pelunasan tunggakan pajak (*independent* (X_2)), memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak (*dependent* (Y)) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega

a. Uji Statistik

Untuk menguji signifikansi suatu koefisien *Korelasi,* maka dapat menggunakan statistik uji t *student* dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = r_{xy} \times \sqrt{\frac{n-2}{1-\left(r_{xy}\right)^2}}$$

(Sugiyono, 2009:184)

Keterangan :
t : nilai uji t
r : koefisien *Korelasi*
n : jumlah sampel

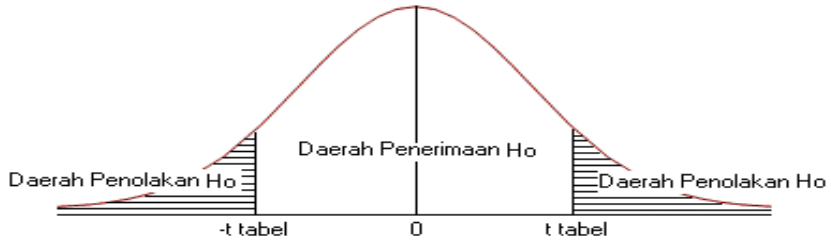
b. Menentukan tingkat signifikansi

Agar hasil perhitungan koefisien korelasi dapat diketahui signifikan/tidak signifikan maka hasil perhitungan dari statistik uji t (t_{hitung}) tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel}. Tingkat signifikannya yaitu α = 0,05 dengan uji dua pihak dan derajat kebebasannya (dk = n-2), artinya jika hipotesis nol ditolak dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukan adanya hubungan (korelasi) yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

c. Kriteria Penarikan Pengujian

Jika menggunakan tingkat signifikansi (α = 0,05) untuk diuji dua pihak, maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} \geq t_{table}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel *independent* (X) dan variabel *dependent* (Y) ada hubungannya.
- Jika $t_{hitung} \leq t_{table}$ maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel *independent* (X) dan variabel *dependent* (Y) tidak ada hubungannya.



Gambar 3.1
Uji Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipótesis

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Kantor Pajak Pratama Bandung Tegalega periode Januari 2014 – Desember 2015. Data yang diperoleh diantaranya Surat Paksa, Jumlah Nominal Surat paksa, Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak, Realisasi Pajak

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Jumlah Surat Paksa dari tahun 2014 hingga tahun 2015 yang telah dikeluarkan dan nilai nominal masing-masing surat paksa jumlahnya selalu berubah. Total surat paksa pada tahun 2014 sebanyak 1729 surat mengalami peningkatan menjadi 4663 surat di tahun 2015. Jumlah nominal surat paksa dari Januari 2014 – Desember 2015 memiliki nominal terendah sebesar Rp. 3.482.393. dan memiliki nominal tertinggi sebesar Rp. 20.015.874.943, dengan rata-rata jumlah nominal surat paksa yang dikeluarkan sebesar Rp. 2.262.134.470,54.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Pencairan Tunggakan Pajak

Presentase tertinggi dari pencairan tunggakan pajak adalah 98,97% dan terendah 77,96% dengan rata-rata 92,24%. Hal ini disebabkan masih ada hutang pajak yang belum terealisasi pencairannya, total tunggakan tergantung pada total hutang pajak beserta sanksi administrasi masing-masing wajib pajak.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak

Presentase pencapaian realisasi penerimaan pajak ada yang melebihi dari targetnya ada juga yang tidak. Penerimaan pajak yang tidak mencapai target hal disebabkan masih terdapat masalah kepatuhan dalam hal pembayar pajak tidak semua membayar pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sehingga berimbas pada penerimaan yang tidak mencapai target.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,800 dan lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolineritas

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.5 diatas nilai *tolerance* ketiga variabel bebas > 0,1 dan nilai VIF semua variabel < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada data.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel 4.6 diatas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,660. Karena nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 < 1,660 < +2 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Berdasarkan seluruh hasil pengujian yang telah dilakukan di atas, maka disimpulkan data dalam penelitian ini tidak diperoleh pelanggaran terhadap asumsi regresi.

4.1.2.2 Regresi Linier Berganda

Dari perhitungan regresi yang telah diolah diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = -107751679{,}298 + {,}473X_1 + 1{,}300X_2$$

4.1.2.3 Koefisien Korelasi

a. Korelasi antara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan Penerimaan Pajak
Hubungan antara Penagihan dengan Surat Paksa dengan Penerimaan Pajak adalah sebesar 0,993 termasuk dalam hubungan yang tinggi.

b. Korelasi antara Pencairan Tunggakan Pajak dengan Penerimaan Pajak
Hubungan antara Pencairan Tunggakan Pajak dengan Penerimaan Pajak adalah sebesar 1,000 termasuk dalam hubungan yang tinggi.

4.1.2.4 Analisis Koefisiensi Determinasi

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa R-*square* sebesar 0,991 atau 99,1%. Nilai tersebut menunjukan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pencairan Tunggakan Pajak secara simultan dalam memberikan pengaruh terhadap variabel Penerimaan Pajak sebesar 99,1%. Sedangkan sisanya sebesar 100% - 99,1% = 0,9% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis

a. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak
Tingkat signifikasnsi α = 0,05, df= (n-k-1)= 24-1-1 =22, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t-tabel sebesar ± 2,073 . Perputaran Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y) karena nilai t-hitung (4,75) berada pada daerah penolakan $H_{0,}$ dengan kata lain H_a diterima, artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak (Y).
.

b. Pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Perputaran Pencairan Tunggakan Pajak (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y) karena nilai t-hitung (12,203) berada pada daerah penolakan $H_{0,}$ dengan kata lain H_a diterima, artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Y)
.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Penagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak

Untuk koefisien berdasarkan tabel 4.14 diperoleh koefisien jalur Pyx= 0,996. Untuk analisis jalur dengan satu variabel bebas, maka koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien jalur yang lainnya sama dengan koefisien korelasi. Berdasarkan tabel di bawah diperoleh nilai ryx sebesar 0,996 yang lainnya sama dengan koefisien jalur yang telah disajikan sebelumnya. Dengan demikian maka koefisien determinasi menjadi 99,1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surat paksa memberikan kontribusi pengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegalega sebesar 99,1%, sedangkan sisanya sebesar 0,9 % merupakan kontribusi variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh informasi bahwa nilai thitung yang diperoleh variabel surat paksa sebesar 4,75. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t. Dengan α = 0,05, df= (n-k-1)= 24-1-1 =22, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t-tabel sebesar ± 2,073. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung untuk variabel surat paksa sebesar 4,75, berada diluar nilai t-tabel (-1,739 dan 1,739), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak Ha diterima, artinya penagihan dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.

Hasil tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Waluyo (2000:238) menyatakan bahwa secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat, maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dirasakan masih terhalang dengan berbagai hambatan yang pada akhirnya menyebabkan sulitnya mendapatkan pelunasan hutang pajak oleh wajib pajak sehingga penerimaan pajak yang tidak optimal. Adapun kendala eksternal dapat berupa perlawanan pasif maupun aktif dalam kerjasama dengan pihak terkait, pengetahuan wajib pajak, likuiditas dan wajib pajak yang sudah tidak berada dialamat terdaftar. Sedangkan hambatan internal dapat berupa hambatan yang datang dari Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP), jurusita pajak, maupun petugas pajak lainnya seperti administrasi penagihan pajak, koordinasi, pengawasan, kualitas dan kuantitas jurusita pajak maupun dari sarana yang disediakan.

Penelitian dari Riskon Ginting (2006) menghasilkan kesimpulan Pemberian surat penagihan terhadap pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Cahyo Wicaksono (2006) menghasilkan kesimpulan Surat Teguran dan Surat Paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak oleh wajib pajak.

4.2.2 Pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Untuk koefisien berdasarkan tabel 4.14 diperoleh koefisien jalur Pyx= 0,996. Untuk analisis jalur dengan satu variabel bebas, maka koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien jalur yang lainnya sama dengan koefisien korelasi. Berdasarkan tabel di bawah diperoleh nilai ryx sebesar 0,996 yang lainnya sama dengan koefisien jalur yang telah disajikan sebelumnya. Dengan demikian maka koefisien determinasi menjadi 99,1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak memberikan kontribusi pengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegalega sebesar 99,1%, sedangkan sisanya sebesar 0,9% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh informasi bahwa nilai t-hitung yang diperoleh variabel surat paksa sebesar 12,203. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t. Dengan α = 0,05, df= (n-k-1)= 24-1-1 =22, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t-tabel sebesar ± 2,073. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung untuk variabel surat paksa sebesar 12,203, berada diluar nilai t-tabel (-2,073 dan 2,073), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak Ha diterima, artinya pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.

Hasil tersebut sesuai dengan teori yang dikemukan oleh John Hutagaol (2007:35) menyatakan pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara

tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelunasan tunggakan pajak agar penerimaan pajak bisa menjadi optimal.

Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, dimana dalam proses penagihan pajak sering ditemukan wajib pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau membayar pajaknya sehingga dengan tidak dilunasinya tunggakan tersebut mengakibatkan penerimaan pajak tidak terealisasi atau sesuai target.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Buddy Hendrawan (2010) Surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak dan Pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

V SIMPULAN DAN SARAN

5.1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1) Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak, hal ini terjadi karena surat paksa memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat memaksa wajib pajak untuk melunasi piutang pajaknya yang selama ini tidak dibayarkan. Apabila wajib pajak membayar pajaknya setelah dilakukan penagihan dan diberi surat paksa maka penerimaan pajak akan meningkat.
2) Pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, hal ini terjadi karena dalam proses pencairan tunggakan pajak oleh wajib pajak akan memberi kontribusi langsung kepada penerimaan pajak, dan pada akhirnya penerimaan pajak akan meningkat. Dan piutang yang selama ini dimiliki wajib pajak akan terbayar.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Oprasional

1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegalega dengan rendahnya penerimaan pajak disebabkan karena masih kurang optimalnya dalam melakukan penagihan pajak, maka dengan diterbitkannya Surat Paksa diharapkan dapat meningkatkan proses penagihan pajak agar wajib pajak mau membayar piutang pajaknya. Selain itu perlu dilakukan peningkatan kualitas penagihan pajak dengan surat paksa itu sendiri.
2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegalega karena belum tercapainya target penerimaan pajak sebaiknya lebih meningkatkan pemasukan dari pencairan tunggakan pajak. Meningkatkan pencairan tunggakan pajak bisa di peroleh dengan cara berikut
   a. Terus mengawasi dan menjaring wajib pajak yang membayar tunggakan pajak tidak sesuai ketentuan dan melakukan penegakan hukum salah satunya dengan pemeriksaan pajak agar dapat memantau dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak pun mengalami peningkatan.
   b. Memperbaiki sistem administrasi yang ada untuk mengawasi tunggakan pajak.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Pengembang Ilmu
   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan disiplin dalam ilmu akuntansi, serta berkontribusi dalam pengembangan penelitian khusunya mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, pencairan tunggakan pajak, dan penerimaan pajak serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
   Disarankan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan metode yang sama tetapi variabel, unit analisis, dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya oleh peneliti saat ini maupun peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Indriantoro, Nur dan Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE, Yogyakarta.

Bhirawa Dwi S F. 2016. Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.

Chaizi Nasucha. 2003. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Disertasi*: Doktor PPs UNPAD, Bandung

Darmin Nasution. 2009. *Penagihan Sebagai Ujung Tombak Penerimaan Pajak.* Diakses pada 28 April 2014 dari http://www.ortax.org

Priantara Diaz 2012. Perpajakan indonesia. Jakarta : Mkitra Wacana media

Gunadi. 2005 Akuntansi Pajak, edisi ketiga, Cetakan Pertama, PT.Gramedia.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi ke-4. Universitas Diponegoro, Semarang.

Juliansyah Noor. 2010. *Metodologi Penelitian*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

Hadi Purnomo. 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan.*Jakarta : Buku Kompas

Kuncoro Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Mala Rizkika, Siti Ragil, Achmad Husaini. 2013. *Analisis Efektifitas dan Konteribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak.*

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi.

Mohammad Nazir. 2003 *Meetode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rusjadi. 2007. *Penagihan Dengan Surat Paksa*. Jakarta: Grasindo.

Saifuddin Azwar. 2000. *Reliabilitas dan Validitas*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan isu. Kencana. Jakarta.

Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2003. *Statistika Untuk Penelitian.* Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Sugiyono, Dr. 2010. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Penerbit Alfabeta

Sugiyono.2012. Metode Penelitian Pendidikan.Bandung: CV Alfabeta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Witono, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2, hal 196-208.*

Yustinus Prastowo, 2009. *Panduan Lengkap Pajak.* Jakarta: Raih Asa Sukses.

LAMPIRAN

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X_1)	Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Siti Kurnia Rahayu 2010: 141)	Jumlah nominal Surat paksa (Siti Kurnia Rahayu (2009: 186))	Rasio
Pelunasan Tunggakan Pajak (X_2)	Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi. (Waluyo (2003:64)	Jumlah Pencairan tunggakan Pajak Diaz Priantara (2012:135),	Rasio
Penerimaan Pajak (Y)	Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (John Hutagaol (2003 :325)	Realisasi Penerimaan pajak (Siti Resmi (2003:74)	Rasio

Tabel 4.1
Laporan Penagihan Pajak

BULAN	2014	
	SP	Jumlah Nominal Surat Paksa
JAN	44	Rp30.348.758
FEB	28	Rp5.007.489
MAR	96	Rp457.930.929
APR	17	Rp3.482.393
MAY	159	Rp549.018.191
JUN	153	Rp638.937.918
JUL	136	Rp389.927.282
AUG	130	Rp709.373.647
SEPT	90	Rp69.838.922
OKT	90	Rp70.929.819
NOV	212	Rp801.737.831
DES	574	Rp1.892.928.482
Total Nominal	1729	Rp5.619.461.661
	2015	
BULAN	SP	Jumlah nominal Surat Paksa
JAN	214	Rp1.738.389.231
FEB	356	Rp738.928.838
MAR	506	Rp4.012.836.283
APR	493	Rp1.829.837.838
MAY	869	Rp5.928.910.010
JUN	203	Rp1.637.818.126
JUL	208	Rp4.617.818.919
AUG	165	Rp2.930.848.214
SEPT	428	Rp2.800.748.504
OKT	756	Rp2.004.838.132
NOV	339	Rp403.849.191
DES	126	Rp20.015.874.943
Total Nominal	4663	Rp48.660.698.229
Nominal Tertinggi		Rp. 20.015.874.943
Nominal Terendah		Rp. 3.482.393
Rata-Rata		Rp2.262.134.470,54

(*sumber data diolah 2016)*

Tabel 4.3
Laporan Pencairan Piutang pajak

BULAN	2014

	Jumlah Pencairan Piutang	%pencairan piutang yang terealisasi
JAN	Rp28.075.089	92,51%
FEB	Rp3.903.972	77,96%
MAR	Rp398.938.303	87,12%
APR	Rp3.282.124	94,25%
MAY	Rp541.837.910	98,69%
JUN	Rp596.782.941	93,40%
JUL	Rp356.829.281	91,51%
AUG	Rp647.818.837	91,32%
SEPT	Rp57.838.219	82,82%
OKT	Rp68.215.284	96,17%
NOV	Rp736.828.910	91,90%
DES	Rp1.873.382.893	98,97%
Total Pencairan tunggakan	Rp5.313.733.763	94,56%
BULAN	**Jumlah Pencairan Tunggakan**	
JAN	Rp1.693.637.187	97,43%
FEB	Rp687.827.931	93,08%
MAR	Rp3.887.737.828	96,88%
APR	Rp1.583.874.476	86,56%
MAY	Rp5.018.930.421	84,65%
JUN	Rp1.430.837.378	87,36%
JUL	Rp4.032.637.463	87,33%
AUG	Rp2.748.929.356	93,79%
SEPT	Rp2.592.476.954	92,56%
OKT	Rp1.858.987.831	92,73%
NOV	Rp378.848.954	93,81%
DES	Rp18.839.546.173	94,12%
Total pencairan tunggakan	Rp44.754.271.952	91,97%
Tertinggi	Rp18.839.546.173	98,97%
Terendah	Rp378.848.954	77,96%
Rata-rata	Rp2.086.166.905	92,24%

(*sumber data diolah 2016)*

Tabel 4.5
Realisasi Penerimaan Pajak

BULAN	2014		
	Realisasi Pajak	Target Penerimaan	% pencapaian realisasi Pajak
JAN	Rp60.565.660	Rp54.678.340	110%
FEB	Rp10.495.861	Rp26.876.456	44%
MAR	Rp670.317.757	Rp857.237.038	72%
APR	Rp7.858.960	Rp25.763.987	28%
MAY	Rp910.846.778	Rp1.032.567.387	87%
JUN	Rp611.353.744	Rp895.627.836	54%
JUL	Rp476.862.012	Rp506.843.981	94%
AUG	Rp1.060.273.061	Rp95.403.452	191%
SEPT	Rp96.417.328	Rp101.746.837	94%
OKT	Rp1.090.529.264	Rp773.678.002	129%
NOV	Rp1.769.189.134	Rp1.590.345.873	110%
DES	Rp3.630.427.585	Rp3.647.938.932	100%
Realisasi Pajak 2014	Rp10.395.137.144	Rp9.608.708.121	108%
JAN	Rp2.393.132.638	Rp1.849.720.546	123%
FEB	Rp1.649.569.848	Rp1.587.045.287	104%
MAR	Rp6.082.268.136	Rp5.456.728.123	110%
APR	Rp2.688.717.923	Rp1.972.454.632	127%
MAY	Rp10.084.170.631	Rp9.503.467.854	106%
JUN	Rp2.383.423.524	Rp2.125.546.256	111%
JUL	Rp5.752.635.839	Rp4.896.785.245	115%
AUG	Rp4.179.172.115	Rp4.569.256.442	91%
SEPT	Rp3.123.786.325	Rp2.975.245.452	105%
OKT	Rp4.104.218.315	Rp3.956.487.217	104%
NOV	Rp1.050.454.135	Rp1.514.545.898	56%
DES	Rp34.317.204.914	Rp32.867.847.323	104%
Jumlah Realisasi Pajak 2015	Rp77.808.754.344	Rp73.275.130.275	106%
Tertinggi	Rp.34.317.204.914	Rp32.867.847.323	191%
Terendah	Rp.7.858.960	Rp25.763.987	28%
Rata-rata	Rp3.675.162.145	Rp3.453.493.267	93,97%

Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Nominal Surat Paksa	24	3.482.393	20.015.874.943	2.262.134.470,54	836.689.532,416	4.098.924.855,094
Pencairan Tunggakan	24	3.478.382	18.839.546.173	2.086.675.082,21	782.722.767,302	3.834.542.779,898
Penerimaan Pajak	24	7.858.960	34.317.204.914	3.675.162.145,33	1.419.539.265,865	6.954.293.742,427
Valid N (listwise)	24					

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters[a,b]	Mean	7E-7
	Std. Deviation	656200741,31185130
Most Extreme Differences	Absolute	,163
	Positive	,096
	Negative	-,163
Kolmogorov-Smirnov Z		,800
Asymp. Sig. (2-tailed)		,544

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

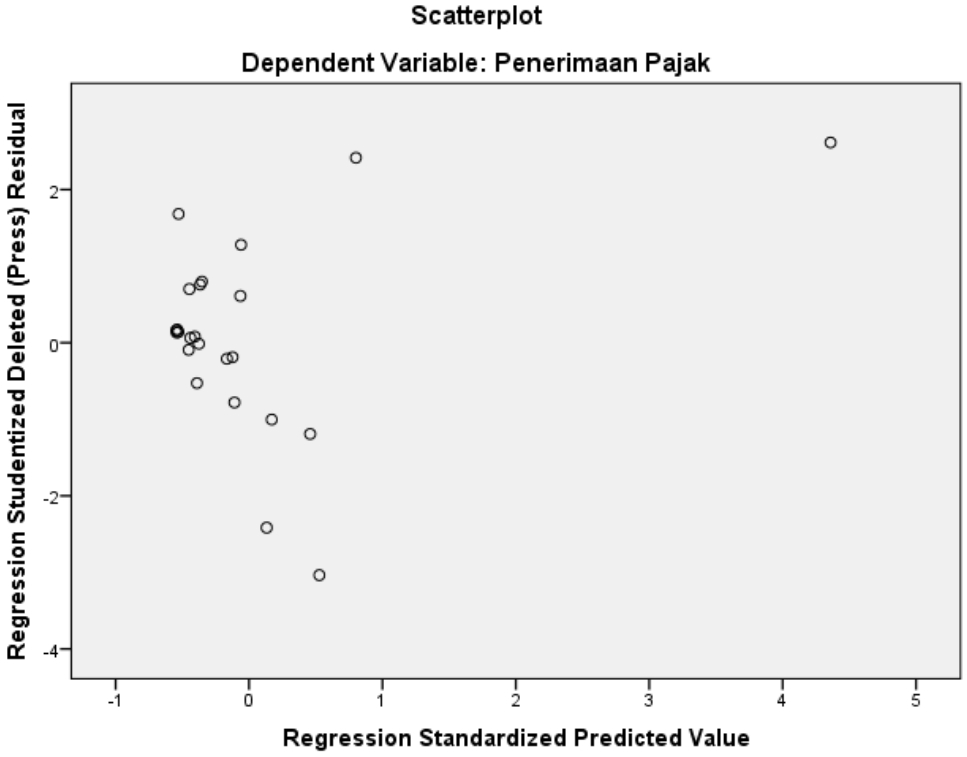
Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Nominal Surat Paksa	,101	,813253
	Pencairan Tunggakan	,101	,813253

Uji a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Heteroskedastisitas



Korelasi (R), Koefisien Determinasi Simultan (R Square) dan Auto Korelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson

1	,996[a]	,991	,990	686.737.854,493	1,660

a. Predictors: (Constant), Pencairan Tunggakan, Nominal Surat Paksa

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Persamaan Regresi (B) dan Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-107751679,298	163709155,991		-,658	,518
	Nominal Surat Paksa	,473	,996	,279	,475	,640
	Pencairan Tunggakan	1,300	1,065	,717	1,220	,236

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Korelasi Parsial

Correlations

Control Variables			Jumlah Nominal	Jumlah Pencairan
RealisasiPajak	Jumlah Nominal	Correlation	1,000	,993
		Significance (2-tailed)	.	,000
		Df	0	9
	Jumlah Pencairan	Correlation	,993	1,000
		Significance (2-tailed)	,000	.
		Df	9	0

Koefisien Determinasi Parsial (Beta x Zerro Order)

Coefficients[a]

Model	Standardized Coefficients	Correlations
	Beta	Zero-order

	(Constant)		
1	Nominal Surat Paksa	,279	,995
	Pencairan Tunggakan	,717	,995

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak